

PERSEPSI MASYARAKAT DESA LAE HOLE II DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) SICIKE-CIKE

Suyono¹⁾✉, R. Hamdani Harahap²⁾, T. Alief Aththorick³⁾

¹Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan SPs USU

²Program Studi Antropologi Sosial FISIP USU

³Departemen Biologi FMIPA USU

Jl. Prof. Maas No. 1 Kampus USU Padang Bulan, Medan

✉ E-mail: *suyono4015@gmail.com* dan *suyonoaja22@yahoo.com*

Abstrak

Pelestarian Taman Wisata Alam agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya tidak lepas dari persepsi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Lae Hole II dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-Cike. Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat Desa Lae Hole II dalam Pengelolaan TWA Sicike-Cike adalah TWA Sicike-Cike memiliki fungsi majemuk (fungsi ekologi, ekonomi dan sosial), 84% masyarakat mengatakan fungsi eksisting hutan masih berfungsi dengan baik, 88% masyarakat mengetahui tentang undang-undang kehutanan dan 94% masyarakat mengetahui fungsi kawasan hutan, 82 % masyarakat menyatakan adanya lembaga pengelolaan hutan dan 82 % masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lae Hole II mengetahui tentang taman wisata alam, fungsi dan undang-undang yang mengaturnya serta menganggap keberadaannya perlu dijaga dan dipertahankan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat di Desa Lae Hole II dalam pengelolaan TWA secara ekologi, ekonomi dan sosial mendukung upaya kelestarian taman wisata wlam. Rekomendasi yang disarankan adalah merumuskan rancangan dengan melibatkan pihak terkait tentang pengelolaan taman wisata alam dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi, peluang dan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi, TWA Sicike-Cike, Desa Lae Hole II

PENDAHULUAN

Taman wisata alam, sebagaimana kawasan konservasi di Indonesia dipengaruhi oleh masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan. Masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi tetap akan bertindak sebagai aktor utama yang mungkin akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap hutan. Oleh karena itu penduduk lokal tidak dapat secara paksa dijauhkan dari hutan. Ndraha (1990) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat akan

semakin kuat apabila semakin banyak manfaat yang diperoleh suatu pihak dari pihak lain atau dalam kata lain sesuai dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap fungsi hutan tersebut.

Ketergantungan dan tidak terpisahkannya kebutuhan masyarakat terhadap ekosistem, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan hutan merupakan salah satu sebab diperlukannya pembinaan/ pengembangan masyarakat di sekitar hutan untuk

ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan. Dalam pengamanan hutan, persepsi masyarakat mempunyai peranan penting terhadap kelestarian hutan, karena kondisi hutan berdampak kepada kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

Taman wisata alam, sebagaimana kawasan konservasi di Indonesia dipengaruhi oleh masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi tetap akan bertindak sebagai aktor utama yang mungkin akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap hutan. Oleh karena itu penduduk lokal tidak dapat secara paksa dijauhkan dari hutan (Ritchie *et al.*, 2001)

Dalam konteks penelitian ini pihak yang dimaksud adalah sumber daya hutan TWA Sicike-Cike dengan masyarakat Desa Lae Hole II. Berdasarkan teori tersebut maka dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi dapat diasumsikan bahwa keterlibatan masyarakat akan semakin meningkat apabila semakin besar ketergantungannya terhadap

kawasan konservasi dan keterlibatan masyarakat akan semakin menurun seiring dengan berkurangnya ketergantungan terhadap kawasan tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Lae Hole II dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-Cike.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan September 2016 sampai bulan Januari 2017 di Desa Lae Hole II, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan masyarakat suku Toba sebagai objek penelitian.

Bahan dan Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian terbagi dalam 2 bagian yaitu peralatan untuk wawancara dan peralatan untuk pengumpulan data. Peralatan untuk wawancara antara lain alat perekam suara, alat tulis dan kamera digital. Bahan yang digunakan adalah daftar kuesioner.

Tipe Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Adapun uraian deskriptif untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Lae Hole II dalam pengelolaan TWA Sicike-Cike.

Jenis dan sumber Data

Jenis sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber utama (responden), sedangkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan badan pusat statistik, buku-buku acuan dan data dari orang lain yang telah terkodifikasi dalam dokumen-dokumen.

Instrumen Penelitian

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kuisisioner, alat bantu kamera dan responden/narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

TWA Sicike-Cike ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 78/Kpts-II/1989 tanggal 7 Februari 1989 dengan luas 575 Ha, secara geografis terbentang antara 98° 20' Bujur Timur – 98°30' Lintang Utara, dan berada pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. TWA Sicike-Cike memiliki objek wisata alam yang sangat potensial dikembangkan sebagai tempat tujuan wisata alam karena memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta terdapat beberapa obyek wisata yang dapat dinikmati seperti danau dan air terjun.

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Lae Hole II Dihuni 748 jiwa (178 kepala keluarga), yang terdiri laki-laki 364 jiwa dan perempuan 384 jiwa, dengan kepadatan 155 jiwa per km². Penduduk Desa Lae Hole II homogen, baik dari sisi suku maupun agama. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lae Hole II adalah Batak Toba. Dari sisi penganut agama, masyarakat seluruhnya menganut agama Kristen Protestan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lae Hole II adalah sangat rendah dimana sebagian besar 35,87 % penduduknya adalah tamatan SD/ sederajat, 29,67% adalah SLTP Sederajat dan 20,32% adalah SLTA sederajat

Mata pencaharian penduduk Desa Lae Hole II yang paling dominan adalah petani yaitu 35,87%. Selain petani, mata pencaharian masyarakat adalah buruh, PNS, dan pedagang. Komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Lae Hole II adalah kopi, sebagai sumber penghasilan utama.

Analisis Kondisi Hutan TWA Sicike-Cike

Objek dan daya tarik wisata di TWA Sicike-Cike adalah 3 buah danau, air terjun, pondok wisata, selther, jembatan, gapura dan jalur wisata. TWA Sicike-Cike juga merupakan surganya tanaman anggrek liar, *Rafflesia* spp, *Nepenthes* spp dan banyak tanaman-tanaman obat yang sudah terbukti khasiatnya dan sudah turun temurun di gunakan sebagai obat tradisional masyarakat Batak Toba.

TWA Sicike-Cike dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Sumatera Utara. Selama tahun 2016 tercatat sebanyak 225 pengunjung, diantaranya dengan tujuan rekreasi dan penelitian, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pengunjung di TWA Sicike-Cike Tahun 2016

| Bulan | Pengunjung | Maksud Kunjungan | Asal Pengunjung |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|
| Januari | 0 | - | - |
| Pebruari | 13 | Wisata dan Pendidikan | Medan dan Sidikalang |
| Maret | 0 | - | - |
| April | 20 | Rekreasi dan Pendidikan | Sidikalang dan Medan |
| Mei | 40 | Rekreasi | Medan dan Sidikalang |
| Juni | 0 | - | - |
| Juli | 14 | Rekreasi dan Penelitian | Medan dan Sidikalang |
| Agustus | 138 | Rekreasi | Sidikalang, Medan |
| Total | 225 | | |

Sumber : BBKSDA (2016).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, fasilitas wisata ini telah berkembang menjadi fasilitas rekreasi skala regional. Terdapat beberapa fasilitas wisata baik di dalam kawasan dan di luar kawasan untuk mewadahi aktivitas wisata di TWA Sicike-Cike, fasilitas di dalam kawasan diantaranya adalah *Shelter* pada empat tempat, tiga buah jembatan titian, sedangkan

fasilitas diluar kawasan adalah Kantor Resort KSDA Sicike-Cike lengkap dengan meja kerja, kursi, sofa tamu, kamar, dapur dan kamar mandi.

Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan TWA Sicike-Cike

Sumberdaya hayati yang diperoleh masyarakat dari dalam hutan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu produktif dan konsumtif. Menurut Primack (1993) (a) produktif, yaitu yang diperjual belikan dipasar dan (b) konsumtif yaitu yang dikonsumsi sendiri atau tidak dijual.

Beberapa jenis sumberdaya hayati dari hutan yang diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lae Hole II adalah kayu, rotan, kemenyan, tanaman obat dan sayut. Sedangkan sumberdaya hayati yang berpotensi namun belum dimanfaatkan maksimal adalah anggrek dan tanaman hias.

Tabel 2. Sumberdaya hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lae Hole II

| No | Jenis Sumberdaya Hayati | Kategori | Keterangan |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | Kayu | Produktif | Diambil, tidak bermusim |
| 2 | Kemenyan | Produktif | Diambil, tidak bermusim |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 3 | Tanaman Obat dan Sayuran | Produktif | Diambil, tidak bermusim |
| 4 | Rotan | Produktif | Diambil, tidak bermusim |
| 5 | Anggrek | Produktif | Belum diambil, tidak bermusim |
| 6 | Tanaman hias | Produktif | Belum diambil, tidak bermusim |

Sumber : data Olahan (2016)

Dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Lae Hole II adalah Petani Kopi (35,87%), namun sebagian besar masyarakat tetap bergantung hidup secara langsung terhadap Hutan TWA Sicike-Cike, melalui memungut rotan, kayu, kemenyan dan tanaman obat. Namun, ada juga masyarakat yang tidak tergantung langsung terhadap Hutan TWA Sicike-Cike, antara lain menjaperantara antara kelompok dengan juragan pembeli rotan, kemenyan maupun kayu, buruh angkut kayu dan lain-lain. Data ketergantungan masyarakat terhadap Kawasan TWA Sicike-Cike, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketergantungan masyarakat terhadap Kawasan TWA Sicike-Cike

| No | Ketergantungan terhadap Kawasan TWA Sicike-Cike | Jumlah Responden (orang) | Persentase (%) |
|----|---|--------------------------|----------------|
| 1 | Ketergantungan terhadap hasil hutan TWA Sicike-Cike : | 5 | 10 |
| a. | Kayu | 4 | 8 |
| b. | Kemenyan | 7 | 14 |
| | | 3 | 6 |
| c. | Tanaman Obat dan Sayur | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| d. | Rotan | | |
| e. | Anggrek | | |
| f. | Tanaman Hias | | |
| | Jumlah | 19 | 38 |
| 2 | Ketergantungan terhadap fungsi ekologis hutan | 16 | 32 |
| 3 | Ketergantungan terhadap fungsi sosial hutan | 15 | 30 |
| | Total | 50 | 100 |

Sumber : Data Olahan (2016)

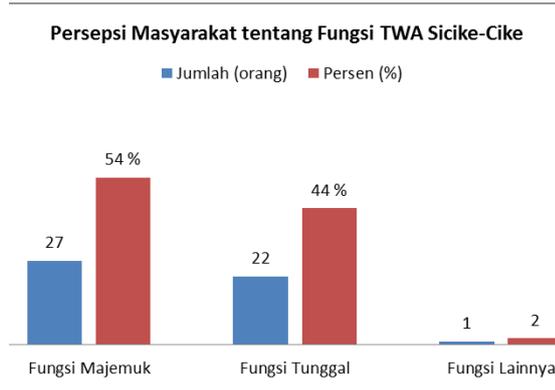
Ketergantungan terhadap hasil hutan adalah ketergantungan tertinggi masyarakat terhadap hutan. Segala manfaat tersebut bisa dicapai dengan syarat kelestarian hutan tetap terjaga, antara lain melalui upaya rehabilitasi maupun reforestasi.

Menurut Field dan Martha (2002) nilai sumberdaya hutan yang dinyatakan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu akan beragam, tergantung kepada persepsi setiap anggota masyarakat tersebut. Kegunaan, kemanfaatan, kepuasan, rasa senang merupakan ungkapan makna atau nilai sumberdaya hutan

yang diperoleh, dirasakan oleh individu atau masyarakat tersebut. Ukuran nilai ini dapat diekspresikan oleh waktu, tenaga, barang atau uang, dimana seseorang bersedia memberikannya untuk memperoleh, memiliki atau menggunakan barang dan jasa yang dinilai.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Fungsi TWA Sicike-Cike

Persepsi masyarakat Desa Lae Hole II terhadap fungsi TWA Sicike-cike adalah cukup baik. Masyarakat menyadari ketergantungan hidupnya dari sumberdaya hayati hutan yaitu sebagai tempat rekreasi, tempat menyimpan cadangan air, tempat mencari penghasilan, mencegah erosi dan fungsi lainnya (Gambar 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi tidak dapat mengalahkan kesadaran masyarakat Desa Lae Hole II akan pentingnya menjaga keberlanjutan keberadaan Sumberdaya hayati TWA Sicike-Cike.



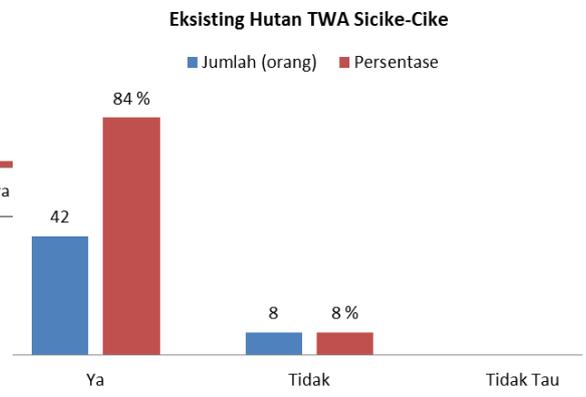
Gambar 1. Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Hutan

Gambar diatas menunjukkan persepsi masyarakat Desa Lae Hole II, memiliki banyak fungsi yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Persepsi masyarakat tersebut dibuktikan dengan jawaban responden yaitu 54% mempersepsikan bahwa hutan memiliki fungsi majemuk dan 44% responden yang menjawab bahwa hutan memiliki fungsi tunggal serta 2% menyebutkan sebagai fungsi lainnya.

Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Eksisting Hutan TWA Sicike-Cike

Ketika ditanyakan tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi eksisting hutan (apakah masih berfungsi dengan baik), 84% responden menjawab bahwa hutan masih berfungsi dengan baik, sedangkan sisanya yaitu 8% menjawab tidak berfungsi dengan

baik. Persepsi masyarakat terhadap fungsi eksisting hutan dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Fungsi Eksisting Hutan TWA Sicike-Cike

Partisipasi Lembaga/Kelompok dalam Pengembangan dan Pelestarian TWA Sicike-Cike

Selain adanya tingkat kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi kawasan hutan, di Desa Lae Hole II terdapat lembaga/kelompok yang berperan aktif dalam pengembangan dan pelestarian TWA Sicike-Cike. Hal ini sangat membantu Dinas Terkait dan Pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan.

Adanya lembaga/kelompok masyarakat yang berperan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian TWA Sicike-Cike menjadi modal dasar dalam menjaga kelestarian fungsi hutan baik secara ekologi, ekonomi dan sosial. Keberpihakan rakyat kepada pengawasan hutan bersama dengan

dinas terkait merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat suka rela berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan TWA Sicike-Cike.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya, dengan demikian pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

Menurut Hardjasoemantri (1995) partisipasi masyarakat adalah memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum, dan

mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan TWA Sicike-Cike

Kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hayati dan ekosistemnya seperti yang tertuang pada UU No 5 Tahun 1990 adalah sebagai bagian dari modal dasar, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan pancasila. Undang-Undang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan masyarakat, serta peningkatan mutu kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada masyarakat menunjukkan bahwa 44 dari 50 responden (88%) mengetahui Undang-Undang Kehutanan, sedangkan 6 dari 50 responden

(12%) tidak mengetahui Undang-Undang Kehutanan. Pengetahuan tentang undang-undang kehutanan diperoleh dari media (cetak dan elektronik), pengetahuan sendiri, selebaran oleh instansi berwenang, serta gabungan dari sumber informasi yang telah disebutkan. Ketidaktahuan tentang peraturan terkait kehutanan tersebut berarti masyarakat tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dalam menjalankan perannya dalam rangka pelestarian hutan. Ketidaktahuan tentang peraturan terkait kehutanan tersebut berarti masyarakat tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dalam menjalankan perannya dalam rangka pelestarian hutan.

Pengetahuan responden tentang undang-undang kehutanan ternyata tidak berkorelasi linier dengan pengetahuan responden tentang perlunya rencana pengelolaan hutan. Baik responden yang menjawab tahu tentang Undang-undang kehutanan maupun yang tidak tahu, keduanya bisa sama-sama menjawab bahwa pengelolaan hutan memerlukan rencana. Ada 35 responden (70%) yang menjawab bahwa pengelolaan hutan

memerlukan rencana, dimana 6 dari 50 responden (12%) tersebut tidak tahu tentang undang-undang kehutanan. Sehingga dengan demikian, pengetahuan responden tentang perlunya rencana pengelolaan hutan tidak selalu dihasilkan sebagai dampak dari pengetahuan mereka tentang undang-undang kehutanan.

Keinginan masyarakat untuk menempatkan kebijakan sebagai sesuatu yang telah akrab bagi mereka juga ditunjukkan dengan pendapat responden akan perlunya perilaku masyarakat di dalam pengelolaan hutan, dimana 49 dari 50 responden (98%) berpendapat bahwa masyarakat perlu dilibatkan di dalam proses pengelolaan hutan.

Menurut pendapat masyarakat, bentuk perilaku dalam pengelolaan hutan adalah ikut mengelola hutan sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, turut mengawasi pengelolaan hutan agar tidak disalahgunakan pihak tertentu, lainnya (misalnya pemberitahuan tentang pohon yang boleh/ tidak boleh ditebang).

Pelibatan yang diinginkan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah adanya benang merah

kepentingan antara masyarakat dan pemerintah di dalam proses implementasi kebijakan, yaitu bahwa kebijakan yang akan diterapkan harus menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, yaitu aspek ekonomi. Pelibatan masyarakat dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan mereka ini sebenarnya juga secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mengawasi dan menjaga kelestarian hutan karena hal itu menyangkut sumber penghidupan mereka.

Kebijakan pengelolaan hutan secara holistik adalah dalam kerangka menjamin kesinambungan pembangunan dari wilayah hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*). Selama ini, pembangunan di wilayah hulu diharapkan tidak se-intensif dibandingkan pembangunan di wilayah hilir, mengingat wilayah hulu merupakan sumber daerah resapan air sehingga luas daerah resapan air ini diharapkan tidak berkurang dengan cara mengurangi aktivitas pembangunan di daerah hulu seperti yang terlihat pada Tabel 4.10. Konsekuensinya masyarakat di daerah hulu seyogyanya menerima konsekuensi dalam

bentuk pemberian kompensasi bagi berkurangnya kesempatan untuk melakukan proses pembangunan.

Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan TWA Sicike-Cike

Pemenuhan kewajiban oleh masyarakat harus disertai adanya jaminan bahwa hak mereka juga dipenuhi. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Pasal 68 dan 69) hak dan kewajiban masyarakat diakui sebagai satu paket kegiatan, dimana bentuk-bentuk pengakuan hak dan kewajiban masyarakat oleh negara tersebut dalam bentuk hak menikmati kualitas lingkungan hidup, hak memperoleh informasi, hak terlibat dalam pengelolaan hutan lewat koperasi dan hak memberikan saran dalam pengelolaan hutan. Sebagai pertimbangan hak yang ada pada masyarakat tersebut, maka mereka berkewajiban turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan tidak boleh melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian hutan.

26 responden (52%) menjawab tahu bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, diantaranya berpendapat bahwa hak mereka adalah mendapatkan manfaat dari hasil hutan seperti mencari kayu bakar sedangkan kewajibannya adalah mereka harus ikut menjaga kelestarian hutan. Dihubungkan dengan ketidaktahuan mereka akan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan, maka persepsi terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan tersebut sebenarnya bukan bersumber dari adanya peraturan yang mengaturnya, namun lebih sebagai akibat adanya kepentingan sosial ekonomi yang ada di masyarakat terkait dengan keberadaan hutan.

Kewajiban menjaga kelestarian hutan sebagai perimbangan dari adanya hak menanam hutan, bukan dalam penegakan hukum melainkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka merasa harus menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan tempat mereka menggantungkan hidup. Adanya

persepsi ini, sebenarnya secara tidak sadar masyarakat melakukan klaim kepemilikan terhadap barang publik (hutan) di sekitar tempat tinggal mereka. Secara tidak sadar pula masyarakat yang tinggal di kawasan hutan melupakan hak warga masyarakat lainnya yang tinggal di daerah hilir untuk tidak menerima dampak negatif sebagai akibat berkurangnya fungsi hutan. Artinya, ada perbedaan konseptual antara persepsi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan dan konsep pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan hutan yang diamanatkan oleh undang-undang kehutanan.

Menurut amanat undang-undang kehutanan, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan antara daerah hulu dan daerah hilir sehingga hutan harus tetap diletakkan sebagai barang publik yang tidak boleh diklaim kepemilikannya oleh siapapun, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (daerah hulu). Termasuk dalam melakukan tindakan konservasi, secara

konsisten masyarakat (responden) memiliki persepsi bahwa tindakan konservasi itu perlu karena di dalam tindakan konservasi tersebut mereka memiliki kepentingan sosial ekonomi.

Tindakan konservasi hutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan, adalah dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Untuk itu, sebenarnya di dalam pengertian tindakan konservasi tersebut mensyaratkan adanya periode penanaman dan penebangan hutan, intensitas tindakan konservasi dan juga jenis pepohonan yang boleh ditanam di areal hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Persepsi masyarakat Desa Lae Hole II dalam pengelolaan TWA Sicike-Cike adalah TWA Sicike-Cike memiliki fungsi majemuk, 84% masyarakat mengatakan fungsi eksisting hutan masih berfungsi dengan baik, 88% masyarakat tau tentang undang-undang kehutanan dan 94% masyarakat tau fungsi kawasan hutan, 82 % masyarakat menyatakan adanya lembaga pengelolaan hutan dan 82 %

masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan.

Saran

Perlu merumuskan rancangan dengan melibatkan pihak terkait tentang pengelolaan taman wisata alam dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi, peluang dan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- BBKSDA Sumatera Utara, 2012. *Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Sicike-Cike*.BBKSDA Sumatera Utara.
- BBKSDA Sumatera Utara, 2012. *Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Sicike-Cike*.BBKSDA Sumatera Utara.
- BPS. 2010. *Statistik Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam(PHKA)*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Ritchie, B., C. McDougall, M. Haggith, NB. Oliveira, 2001. *Pedoman Pendahuluan : Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (Community Managed Forest)*. CIFOR. Jakarta.
- Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Bdanung : Rineka Cipta.

Primack. 1999. *Kesepakatan
Konservasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kawasan
Konservasi.Protected Areas
Community Development
Specialist. The Natural
Resources Management/EPIQ
Program's Program Protected
Area Management.*